
Analisis Perbandingan Atas ROA Sebelum Dan Setelah Penerbitan Laporan Keberlanjutan

Aida Wijaya¹⁾, Robertus Ary Novianto²⁾

^{1,2)}Universitas Widyatama

rafael.aida@widyatama.ac.id¹⁾, robertus.novianto@widyatama.ac.id²⁾

ARTICLE INFO

Article History:

Received : November 25,
2023

Accepted : November 30,
2023

Published : December 1,
2023

Keyword:

ROA, SDG, ESG,
Sustainability Report,
POJK No.51/OJK.03/2017

Corresponding Author:

Aida Wijaya

rafael.aida@widyatama.ac.id

ABSTRACT

Sustainability Development Goals had become a mandatory activity for public company in Indonesia since the government get into the Paris Agreement in 2016. It is according to the regulation from the Financial Service Authority – FSA No.51/OJK.03/2017 that public company have to report its sustainable activities in Sustainability Report. The regulation requires that public companies follow the activities to be reported in three category of items, which are the economic, social and environment activities. Along with the integration of the sustainability activity into the operational activity of companies, it is assumed that there would be a change toward better company performance in those three categories. Using the paired sample t-test, this research analyzed the difference of company's performance before and after the issuance of its Sustainability Report. Using Return On Assets as the proxy of the performance, the research found that there was no significant difference of it before and after the issuance of Sustainability Report.

ABSTRAK

Sustainability Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sudah menjadi aktivitas yang wajib diselenggarakan oleh perusahaan yang sudah go public di Indonesia sejak pemerintah berkomitmen untuk mengikuti perjanjian Paris Agreement di tahun 2016. Hal tersebut sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan - POJK No.51/OJK.03/2017 yang menyatakan bahwa perusahaan publik harus melaporkan aktivitas keberlanjutannya dalam suatu Laporan Keberlanjutan. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan publik mengikuti item-item aktivitas yang harus dilaporkan ke dalam tiga kategori, yakni aktivitas ekonomi, aktivitas sosial dan aktivitas terkait pelestarian lingkungan hidup. Bersamaan dengan terintegrasinya berbagai aktivitas keberlanjutan di dalam kegiatan operasi perusahaan sehari-hari maka seyogyanya akan terdapat perubahan pada kegiatan perusahaan ke arah kinerja yang lebih baik dalam ketiga kategori tersebut. Menggunakan paired sample t-test, penelitian ini menganalisis perbedaan kinerja sebelum dan setelah perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan. Dengan Return On Asset sebagai proksi kinerja, penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara sebelum dan setelah penerbitan Laporan Keberlanjutan.

How to Cite:

Wijaya, A., & Novianto, R.,A. (2023). Analisis Perbandingan Atas ROA Sebelum Dan Setelah Penerbitan Laporan Keberlanjutan. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 18(2), 198-213 . <https://doi.org/10.21009/wahana.18.024>

PENDAHULUAN

Aktivitas keberlanjutan yang menjadi agenda pemerintah Indonesia meliputi aktivitas yang terkait dengan *ESG (Environment, Social and Governance)*. Aktivitas tersebut terdiri dari 17 poin tujuan yang disebut dengan *Sustainability Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Gerakan tersebut banyak diinisiasi oleh negara-negara Eropa yang fokus perhatiannya terutama pada peningkatan emisi CO₂ yang semakin tinggi dan merusak lingkungan hidup. (United Nations, 2015)

Pelibatan perusahaan yang dianggap banyak berkontribusi terhadap degradasi lingkungan hidup sudah dimulai sejak dekade lalu, namun masih dalam lingkup kecil. Indonesia baru mulai terlibat dalam aksi aktif setelah menandatangani Paris Agreement di tahun 2015. Setelah itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan keharusan bagi LJK, Emiten dan Perusahaan Publik untuk menerapkan aktivitas keberlanjutan dan melaporkannya, dengan adanya POJK No.51/OJK.03/2017 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Namun memang penerapan peraturan tersebut cukup banyak terhambat karena dipaksakan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu hambatan juga banyak disebabkan kurangnya pemahaman maupun kesiapan perusahaan untuk memasukkan berbagai faktor aktivitas keberlanjutan ke dalam aspek bisnisnya. Ditambah lagi dengan adanya kondisi pandemic Covid 19 yang melanda yang menyebabkan perusahaan banyak kesulitan dalam mempertahankan usahanya, maka sudah jelas aktivitas keberlanjutan bukan menjadi fokus perusahaan.

Terdapat banyak pedoman atau standar yang dapat digunakan di tingkat internasional untuk melaporkan aktivitas tersebut. Di Indonesia, perusahaan go publik sudah harus menyusun Laporan Keberlanjutan sebagaimana yang disyaratkan oleh OJK. Meskipun pada Lampiran II POJK No. 51/OJK.03/2017 (OJK, 2017) telah diuraikan poin-poin yang harus dilaporkan dalam Laporan Keberlanjutan, Aktivitas keberlanjutan seyogyanya adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Aktivitas keberlanjutan diharapkan menjadi landasan bagi berbagai inovasi dalam bisnis yang lebih ramah lingkungan dan lebih memperhatikan manusia sebagai subjek dalam suatu bisnis. Dengan demikian, dengan memasukkan aktivitas keberlanjutan ke dalam aktivitas bisnis perusahaan diharapkan kinerja perusahaan akan berkembang menjadi semakin lebih baik.

Dalam kenyataannya, mengintegrasikan aktivitas keberlanjutan ke dalam kegiatan operasi yang sudah sedang berjalan tidak mudah dan mungkin juga tidak murah. Karena itu untuk jangka waktu pendek, investasi yang dikeluarkan perusahaan mungkin akan cukup besar untuk upaya tersebut. Dampaknya, dalam jangka waktu pendek maka kemungkinan terdapat peningkatan investasi dalam berbagai aset atau pengeluaran sebagai beban, yang menyebabkan tampaknya tingkat pengembalian (*return*) akan lebih sedikit dibandingkan investasi yang dikeluarkan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan menganalisis perbedaan kinerja perusahaan sebelum dan setelah adanya aktivitas keberlanjutan yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutan. Perbandingan tersebut berguna bagi perusahaan untuk mengevaluasi apakah aktivitas keberlanjutan yang dilakukannya sudah tepat dan dapat meningkatkan kinerja di masa depan. Jika aktivitas yang dilakukan dan dilaporkan dianggap sudah tepat, seharusnya akan terdapat perubahan yang signifikan dalam ROA perusahaan. Dalam periode awal penerapan aktivitas keberlanjutan terdapat kemungkinan bahwa perusahaan harus berinvestasi pada aset tetap yang menjadi fasilitas pendukung aktivitas tersebut, yang mungkin akan menyebabkan

naiknya nilai aset tetap. Namun dalam jangka waktu panjang diharapkan terjadi efisiensi dari aktivitas keberlanjutan yang dapat menyebabkan naiknya *return*.

Hasil dari analisis penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pengembangan yang baik bagi perusahaan di Indonesia untuk menerapkan aktivitas keberlanjutan tersebut lebih dari apa yang disyaratkan oleh POJK. Karena aktivitas keberlanjutan seyogyanya menjadi bagian keseharian dalam bisnis yang lebih baik bagi lingkungan dan bukan semata *bisnis as usual*.

Tuntutan atas kepekaan perusahaan atas dampak keberadaannya terhadap lingkungan hidup, baik dari sisi ekonomis, dari sisi sosial, maupun dari sisi ekosistem alam, akan menjadi fokus perhatian penting bagi generasi mendatang. Sehingga penting bagi perusahaan untuk memperhatikan pemangku kepentingan masa depan tersebut agar keberadaan perusahaan tetap berkelanjutan.

TINJAUAN TEORI

Aktivitas Keberlanjutan

Meskipun upaya untuk mengentaskan kemiskinan, melestarikan lingkungan hidup dan berbagai upaya negara-negara dunia untuk membuat bumi menjadi tempat tinggal yang lebih baik bagi generasi mendatang, baru dalam Paris Agreement yang diselenggarakan pada bulan September 2015, pemerintah 159 negara dunia menyatakan komitmen yang lebih terfokus untuk melaksanakannya. Di dalam Sidang Umum PBB tersebut dirumuskan 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan target pencapaian transformasi pada tahun 2030 (United Nations, 2015).

United Nations Development Programme (UNDP) menjadi organisasi yang mempunyai misi untuk memastikan tercapainya SDGs tersebut di tingkat internasional. Sehingga UNDP berperan aktif untuk melakukan berbagai sosialisasi dan upaya lainnya dalam meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan secara internasional dalam berperan aktif mendukung pelaksanaan program tersebut. SDGs terdiri dari 17 target yang digambarkan sebagai berikut (United Nations Development Program, 2015). Di Indonesia SDG tersebut diadopsi dengan diterjemahkan sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020).

Tujuh belas target tersebut dicanangkan sebagai tujuan pembangunan nasional yang wajib didukung oleh seluruh komponen masyarakat, baik pihak pemerintah, maupun pihak swasta, baik perusahaan maupun individu masyarakat. Tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memang tidak wajib dilakukan secara komprehensif oleh suatu entitas. Artinya satu entitas atau perusahaan dapat memilih hanya beberapa hal yang akan dijadikan fokus dalam aktivitas keberlanjutannya.

Uraian ringkas atas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 1 adalah upaya untuk menghapuskan kemiskinan di masyarakat. Tujuan ini lebih cenderung merupakan visi dari perusahaan daerah atau pemerintah daerah yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Apabila dijawantahkan di entitas atau perusahaan maka peran perusahaan dalam hal ini adalah dengan berupaya membuka kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat sekitar, agar masyarakat di sekitar perusahaan menjadi berdaya untuk lepas dari jerat kemiskinan.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2 adalah agar tidak sampai terjadi kondisi kelaparan di masyarakat, hal ini sejalan dengan TPB 1, sehingga upaya-upaya yang dilakukan juga akan sinambung dengan TPB 1.
3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 3 adalah upaya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini akan tercapai idealnya setelah TPB 1 dan TPB 2 dapat dipenuhi. Adapun bagi strata masyarakat yang sudah terpenuhi TPB 1 dan TPB 2, maka TPB 3 menjadi sasaran selanjutnya. Inipun masih cenderung menjadi tugas pemerintah daerah, terkait fasilitas kesehatan dan kesejahteraan, seperti puskesmas, rumah sakit yang tersedia di setiap daerah yang dapat melayani masyarakat, bahkan termasuk kesejahteraan secara mental, seperti misalnya ketersediaan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk rekreasi bagi masyarakat.
4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 adalah untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas. Dalam hal ini pendidikan berkualitas harus merupakan fasilitas yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5 adalah mengupayakan kesetaraan gender baik dalam hal pekerjaan maupun dalam arti hak azasi manusia. Karena itu di dalam laporan keberlanjutan, perusahaan perlu mengungkapkan gambaran demografi pegawainya dari sisi gender. Baik dalam hal misalnya training yang diberikan secara sama rata tanpa melihat gender, maupun dari faktor jenjang karir, dimana tidak ada perbedaan perlakuan ataupun syarat dalam mencapai strata manajerial di perusahaan.
6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 6 menyediakan air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Ketersediaan air bersih terkait dengan sanitasi dapat dilakukan oleh pihak pemerintah maupun privat. Ketersediaan air bersih dan sanitasi akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat, sehingga pada dasarnya juga akan saling mendukung dengan TPB 3.
7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 7 adalah menyediakan energi bersih yang terjangkau. Saat ini di Indonesia ketersediaan energi utama masih berasal dari minyak bumi atau batu bara. Bahkan ketika masyarakat diminta untuk menggeser berbagai peralatan ke arah peralatan berenergi listrik, PLN masih terkendala untuk mengubah sumber daya pasokan listriknya dari batu bara ke energi yang lebih ramah lingkungan, seperti tenaga air, tenaga angin, atau tenaga geothermal.
8. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8 adalah menyediakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. TPB ini harus banyak didukung oleh perusahaan. Pada jaman teknologi komputerisasi dan otomatisasi sekarang ini menjadi suatu dilema bagi perusahaan untuk mempertahankan aktivitas yang padat karya. Di satu sisi perusahaan mendapat tekanan untuk melakukan efisiensi dan menghasilkan profit pada faktor ekonomi, dimana hal tersebut seringkali berarti mengganti faktor manusia menjadi mesin. Namun perusahaan juga dituntut untuk tetap dapat menyediakan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Terkadang kendala terjadi ketika pendidikan atau kemampuan calon tenaga kerja ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan atau kriteria yang diharapkan perusahaan. Hal ini terkait juga dengan upaya pemenuhan TPB 4, yakni tersedianya fasilitas pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,
9. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 9 adalah mengembangkan industri, inovasi dan infrastruktur yang baik. Hal ini banyak menjadi tugas bagi perusahaan selain dari penunjang infrastruktur yang menjadi kewajiban pemerintah.
10. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 10 adalah upaya untuk memperkecil kesenjangan. Hal ini terkait juga dengan TPB 1 dan TPB 2.

11. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 11 menciptakan kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Secara komprehensif, pemerintah harus berfokus pada tata kota yang di masa depan akan memiliki kemampuan untuk mendukung kehidupan masyarakatnya secara mandiri.
12. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 12 adalah untuk menyadarkan masyarakat agar memproduksi maupun mengkonsumsi dengan tanggung jawab. Produksi tentunya menjadi tugas industri atau perusahaan. Namun masyarakat juga diharapkan untuk hanya mengkonsumsi produk yang mendukung aktivitas keberlanjutan, terutama terkait dengan kelestarian lingkungan hidup. Artinya produksi yang dilakukan juga tentunya akan menyesuaikan dengan permintaan dari masyarakat.
13. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 13 adalah upaya menangani perubahan iklim. Hal ini terutama ada di tangan industri, terkait dengan polusi yang dihasilkan dari pabrik atau kendaraan berbahan bakar minyak bumi.
14. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14 adalah menjaga ekosistem lautan yang artinya pengambilan sumber daya lautan tidak dilakukan dengan cara-cara yang dapat merusak biota laut.
15. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 15 adalah menjaga ekosistem daratan dimana pengelolaan tanah dilakukan secara bertanggung jawab tanpa merusak ekosistem darat.
16. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16 adalah mengupayakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh terutama pada pemerintahan.
17. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 17 meningkatkan kemitraan untuk pencapaian berbagai tujuan, baik kemitraan pihak pemerintah dengan swasta, maupun kemitraan antar negara.

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



Gambar 1

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Bappenas, 2020

Sebagai negara yang turut berkomitmen dalam mencapai target SDGs tersebut, pemerintah Indonesia melakukan langkah strategis dengan mengintegrasikan ke-17 target tersebut ke dalam perencanaan kerja pemerintah. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dimasukkan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Secara garis besar, TPB tersebut dibagi ke dalam 4 pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup dan pembangunan tata kelola yang baik (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2017).

Untuk lebih mengarahkan dalam implementasi target-target tersebut, pemerintah Indonesia Menyusun suatu peta jalan. Peta jalan dimaksudkan agar para pemangku kepentingan memiliki panduan dalam menetapkan target untuk setiap program yang terarah pada SDGs, memiliki rancangan perencanaan dan strategi yang baik, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaannya agar sesuai dengan yang diharapkan dari SDGs. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2017).

Karena kegiatan berkelanjutan ini merupakan kegiatan yang bersifat komprehensif yang menyatukan unsur manusia dan lingkungan secara bersamaan, maka setiap tujuan dalam SDGs memiliki keterkaitan. Dengan demikian semua rancangan kegiatan juga harus dipertimbangkan dalam pendekatan yang bersifat holistik. Kebijakan yang didesain secara multisektoral, sistematis dan dapat diimplementasikan secara komprehensif. Oleh sebab itu sangat penting pemahaman yang menyeluruh agar pada saat implementasi dapat dikaitkan antara berbagai

faktor yang saling mendukung dalam tercapainya target SDGs tersebut. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2017).

Saat ini sudah lewat 7 tahun dari saat komitmen internasional tersebut dan sudah cukup banyak keterlibatan stakeholders dalam upaya mewujudkan SDGs. Meskipun mungkin banyak aktivitas sempat terkendala oleh pandemi Covid 19, namun justru kondisi pandemi Covid 19 itu sendiri menjadi bukti nyata bagaimana stakeholders saling bahu-membahu untuk bertahan dan mengalahkan keadaan yang menyulitkan tersebut. Implementasi yang dilakukan oleh berbagai organisasi tersebut perlu dievaluasi agar dapat ditinjau perkembangannya, apakah sudah sejalan dengan SDGs yang ditetapkan dan sejauh mana akan mencapai targetnya di tahun 2030.

Pelaporan Aktivitas Keberlanjutan

Di lingkup perusahaan, pelaporan atas hasil penerapan aktivitas keberlanjutan tersebut banyak disajikan dalam suatu laporan keberlanjutan yang disusun berdasarkan berbagai pedoman atau standar. Di negara-negara yang berkiblat pada Amerika Serikat cukup banyak yang mengacu pada SASB Standards (*Sustainability Accounting Standards Board Standards*), sedangkan di negara yang berorientasi Eropa banyak yang menggunakan GRI Standards (*Global Reporting Initiatives Standards*) untuk dijadikan pedoman dalam pelaporan aktivitas keberlanjutannya.

Adapun GRI Standards merupakan pedoman yang lebih bersifat umum, karena standard yang ada disusun berdasarkan pada topik umum yang dapat diaplikasikan ke berbagai jenis industri. Topik tersebut dikelompokkan menjadi topik terkait limbah, air, emisi, juga sosial, seperti keselamatan kerja, kesetaraan gender, dan seterusnya. Tujuan organisasi ini adalah agar dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan diharapkan perusahaan dapat memberikan pelaporan yang transparan berkaitan dengan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan dan masyarakat. (*Global Reporting Initiatives*, 2021)

Standar yang diterbitkan oleh SASB merupakan referensi yang dapat diacu oleh berbagai jenis industri karena disusun dengan cukup spesifik tergantung pada aktivitas yang mungkin terjadi pada setiap jenis industri dan dampaknya terhadap lingkungan. Di dalam *SASB Standards* terdapat pengungkapan terkait dengan topik material, metrik akuntansi yang terkait dan protokol teknis, juga metrik aktivitas per jenis industri. Standard ini pada dasarnya mengandung definisi, ruang lingkup, penerapan, kompilasi dan penyajian yang sesuai dengan metrik yang digunakan dalam akuntansi. (*SASB*, 2018)

Saat ini tengah dilakukan upaya untuk harmonisasi atau menyatukan berbagai sudut pandang dari berbagai organisasi pemerhati lingkungan yang sekaligus menjadi *standar-setter* pedoman aktivitas keberlanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan pembentukan ISSB (*International Sustainability Standard Boards*) yang sudah dimulai sejak akhir tahun 2022. ISSB cenderung serupa dengan SASB, karena merupakan gabungan dari beberapa organisasi yang cukup besar mempengaruhi di kawasan Amerika Serikat. Meskipun demikian, GRI juga ikut terlibat dalam upaya menyamakan pedoman tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

Sementara standar untuk pelaporan keberlanjutan masih banyak diterbitkan oleh berbagai organisasi di banyak negara, pemerintah Indonesia telah tanggap dengan segera mengeluarkan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan, yakni POJK No.51/OJK/03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik. Awalnya peraturan tersebut diterapkan terhadap Lembaga Jasa Keuangan, dengan harapan percepatan implementasi dapat disosialisasikan kepada pemangku kepentingan yang lebih luas,

mengingat Lembaga Jasa Keuangan merupakan entitas yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, baik sebagai kreditur maupun sebagai debitur. (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Teknis lebih lanjut terkait apa saja yang harus dilaporkan dijabarkan dalam Lampiran II POJK No. 51/OJK.03/2017 tersebut.

Meskipun berbagai standar atau pedoman dan peraturan telah diterbitkan sebagai panduan pelaksanaan di tingkat teknis, namun pelaksanaannya sendiri sangat tergantung dari niat elemen masyarakat yang ingin terlibat. Artinya, apakah implementasi aktivitas keberlanjutan ini hanya sebagai wacana untuk pemenuhan persyaratan ketaatan atas perundangan (*compliance*) atau memang disadari sebagai aktivitas yang memang dibutuhkan demi kelestarian lingkungan hidup. Karena tujuan dari pemenuhan target SDGs tersebut seharusnya berorientasi pada tindakan nyata dan bukan semata menjadi *green-washing* yang menunjukkan ketaatan sebagaimana yang terjadi ketika perusahaan melakukan *business as usual*.

Return On Assets

Return on Asset merupakan suatu rasio dimana laba bersih yang dihasilkan perusahaan pada satu periode tertentu dibagi oleh rata-rata aset yang digunakan perusahaan. Rata-rata aset yang digunakan perusahaan dihitung dengan menjumlahkan nilai aset awal periode dengan nilai aset akhir periode, kemudian dibagi 2. Rumus ROA diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Net Income}}{\frac{(\text{beginning total assets} + \text{ending total assets})}{2}}$$

Rasio ini menunjukkan berapa persentase income yang dihasilkan atas setiap unit moneter yang diinvestasikan dalam sumber daya perusahaan yang dinilai dari asetnya. (Bergevin;2002). Ditinjau dari faktor-faktor yang membentuk rumus tersebut, ROA merupakan rasio yang cukup kompleks. Laba bersih yang dilaporkan menurut perhitungan akuntansi merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang terjadi sepanjang satu periode di perusahaan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mencoba mencari hubungan antara kinerja perusahaan dengan penerapan aktivitas keberlanjutan di perusahaan. Burhan dan Rahmanti (2012) menguji hubungan pelaporan keberlanjutan dengan ROA dan menemukan bahwa terdapat pengaruh antara pelaporan keberlanjutan dengan kinerja. Selain itu Felita dan Faisal (2021) juga meneliti pengaruh laporan keberlanjutan atas kinerja perusahaan di perusahaan perbankan dan menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan secara positif mempengaruhi kinerja perusahaan yang diprosikan dengan ROA, ROE dan NIM.

Hasil penelitian Wijayanti (2016) juga menemukan bahwa semua aspek dalam laporan keberlanjutan memiliki pengaruh signifikan atas ROA perusahaan. Hal yang sama juga dihasilkan dari penelitian Bukhori (2017), bahwa semua aspek laporan keberlanjutan memiliki pengaruh signifikan atas kinerja perusahaan.

Namun ada pula penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa antara kinerja dengan *sustainability activity* tidak terdapat korelasi yang signifikan, sebagaimana penelitian

Wahyuningtyas, Susesti dan Murtadho (2021). Penelitian tersebut membahas mengenai apakah dengan telah dilaksanakannya aktivitas keberlanjutan dan menerima penghargaan atas aktivitas tersebut maka kinerja perusahaan publik akan membaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas tersebut tidak berdampak signifikan atas ROA perusahaan.

Perumusan Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk melihat signifikan tidaknya perbedaan kinerja perusahaan publik pada sektor *non-cyclical consumption*. Kinerja yang diteliti adalah diprosikan dengan ROA perusahaan sebelum dan setelah menerapkan aktivitas keberlanjutan sesuai dengan peraturan OJK. Dengan rentang waktu yang relatif pendek, maka seharusnya ROA setelah adanya aktivitas keberlanjutan akan terpengaruh menjadi lebih rendah.

Argumen tersebut karena asumsi sebelum adanya Laporan Keberlanjutan, diasumsikan perusahaan belum melaksanakan aktivitas keberlanjutan sesuai item-item dalam POJK No.51/OJK.03/2017. Ketika terdapat peraturan yang mewajibkan pelaksanaan aktivitas keberlanjutan, perusahaan harus melakukan pengeluaran modal (*capital expenditure*) yang menambah nilai aset sebagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas keberlanjutan. Dengan demikian, pada jangka waktu yang relatif pendek, jika return dianggap stabil, sementara nilai aset bertambah secara signifikan, maka ROA akan cenderung menurun.

Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Ho: tidak terdapat perbedaan nilai ROA sebelum dan setelah penerbitan laporan keberlanjutan

Ha: terdapat perbedaan nilai ROA sebelum dan setelah penerbitan laporan keberlanjutan

METODE

Populasi dan Sampel

Penelitian ini mengambil populasi perusahaan go publik pada kategori sektor *consumer non-cyclicals* yang menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun 2021. Tahun ini diambil dengan pertimbangan bahwa pada tahun tersebut sudah banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam POJK 51/OJK.03/2017 dan ditegaskan kembali dalam Surat Edaran OJK No.16/SEOJK.04/2021. Banyak perusahaan go publik yang baru menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun 2021 yang sebelumnya belum menerapkan aktivitas keberlanjutan karena terkendala kondisi pandemi Covid-19.

Sampel yang diolah terdiri dari 19 perusahaan yang diambil berdasarkan pada *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang pada tahun 2020 belum menerbitkan laporan keberlanjutan, yang diasumsikan belum menerapkan aktivitas keberlanjutan atau belum menerapkannya secara signifikan dan
2. Perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun 2021, yang diasumsikan telah menerapkan aktivitas keberlanjutan
3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2020 dan tahun 2021

Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini digunakan teknik dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Dimana teknik dokumentasi berarti melakukan pengumpulan data yang tersedia, yakni data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang sudah ada, misalnya merupakan data keuangan perusahaan maupun sumber lainnya. Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. (Sunyoto, 2013)

Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini adalah berasal dari Laporan Keberlanjutan untuk tahun 2021 dan tahun 2020 yang diterbitkan oleh perusahaan publik pada kategori sektor *consumer non-cyclycals*. Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yang terkumpul kemudian dicatat, dihitung dan diolah kembali untuk mendukung penelitian ini. Data yang diolah dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dari laman OJK yang menyediakan data laporan keberlanjutan dan laporan keuangan perusahaan.

Variabel Penelitian

Penelitian ini membandingkan ROA pada kelompok perusahaan go publik sektor tersebut antara nilai ROA sebelum dan setelah adanya penerbitan laporan keberlanjutan, yakni ROA tahun 2020 dan ROA tahun 2021. Karena penelitian ingin menemukan perbedaan di antara dua set data dari perusahaan yang sama, sebelum dan setelah penerbitan Laporan Keberlanjutan, maka variabel data dalam penelitian merupakan data yang berpasangan. Dengan demikian alat uji yang digunakan adalah *Paired Sample T-Test*.

Dari hasil mengambil sampel, diperoleh 19 perusahaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian terdapat 19 sampel berpasangan dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini berupa ROA dari 19 perusahaan yang berasal dari laporan tahun 2020 dan tahun 2021. Tahun 2020 adalah tahun dimana perusahaan belum menerbitkan laporan keberlanjutan, sedangkan tahun 2021 adalah tahun dimana perusahaan sudah menerbitkan laporan keberlanjutan. Data ROA tahun 2020 dibandingkan dengan data ROA tahun 2021.

Pengujian Statistik

Uji beda ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari ROA sebelum dan setelah adanya aktivitas keberlanjutan dalam jangka pendek. Berdasarkan argumen yang telah dirumuskan maka dihipotesiskan akan terdapat beda signifikan antara ROA sebelum adanya Laporan Keberlanjutan dibandingkan dengan ROA setelah adanya Laporan Keberlanjutan.

Penelitian ini membandingkan ROA pada kelompok perusahaan go publik sektor tersebut antara nilai ROA sebelum dan setelah adanya penerbitan laporan keberlanjutan, yakni ROA tahun 2020 dan ROA tahun 2021. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji beda harga dua mean ($U_1 - U_2$). Uji beda harga dua mean bertujuan menguji ada tidaknya perbedaan harga dua populasi yang diuji melalui dua rata-rata sampel (Sunyoto, 2013). Dengan sampel sebanyak 19 perusahaan, berarti $n_1 + n_2 - 2 \leq 30$, maka kriteria pengujian hipotesis menggunakan t-tabel.

Berkaitan dengan hipotesis yang dibentuk maka dapat dirumuskan bahwa:

Ho: $U_1 - U_2 = nol$ (kedua rata-rata populasi adalah sama)

Ha: $U_1 - U_2 > nol$ (pengujian satu sisi kanan),

dimana:

U1 = ROA pada tahun 2020 yakni sebelum penerbitan laporan keberlanjutan

U2 = ROA pada tahun 2021 yakni setelah penerbitan laporan keberlanjutan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik

Berdasarkan pada hasil uji statistik non-parametrik, diperoleh bahwa ROA tahun 2020 maupun tahun 2021 berdistribusi normal. Hasil pengujian tersebut ditampilkan dalam Tabel. 1. Dengan demikian atas data ROA yang terkumpul layak untuk dilakukan pengujian selanjutnya.

Tabel 1. Hasil Tes *Non-Parametric*

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of ROA Thn 2020 is normal with mean 0.03 and standard deviation 0.07.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.826	Retain the null hypothesis.
2	The distribution of ROA Thn 2021 is normal with mean 0.05 and standard deviation 0.05.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.710	Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2023

Hasil t-test menunjukkan beberapa hal yang digambarkan pada Tabel 2, Tabel 3, dan Table 4 berikut ini:

Tabel 2. Hasil Statistik *Paired Samples T- Test*

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 ROA Thn 2020	.0326	19	.07302	.01675
ROA Thn 2021	.0463	19	.04856	.01114

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2023

Tabel 2 menampilkan data yang diuji dengan t-test menunjukkan bahwa ROA tahun 2021 mempunyai rata-rata (*Mean*) sebesar 0,0463 lebih besar dari rata-rata ROA tahun 2020 sebesar 0,0326, yang artinya terjadi peningkatan ROA di tahun 2021. Hal ini berbeda dari ekspektasi bahwa terjadi penurunan ROA dalam jangka pendek setelah adanya aktivitas keberlanjutan.

Tabel 3. Hasil Korelasi *Paired Samples*

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 ROA Thn 2020 & ROA Thn 2021	19	.810	.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2023

Dalam Tabel 3 tampak bahwa hasil uji korelasi *paired samplest-test* menunjukkan korelasi senilai 0,810 dengan signifikansi 0,000 <0,05 yang artinya ada hubungan erat ROA tahun 2020 dengan tahun 2021.

Nilai signifikansi 0,193 > 0,05 dalam Tabel 4 menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengukuran sebelum dan setelah terbitnya pelaporan keberlanjutan. Selisih rata-rata diperoleh nilai -0,1368, dimana tanda negatif menunjukkan bahwa ROA tahun 2020 lebih kecil dari ROA tahun 2021.

Tabel 4
Hasil Paired Sample T-Test

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 ROA Thn 2020 - ROA Thn 2021	-.01368	.04412	.01012	-.03495	.00758	-1.352	18	.193

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2023

Pembahasan

Aktivitas keberlanjutan yang baru diterapkan, terutama jika dikaitkan dengan pengurangan emisi gas berbahaya ke atmosfer bumi, merupakan hal yang sangat mungkin akan berdampak terjadinya pengeluaran investasi bagi perusahaan. Hal ini karena keharusan perusahaan untuk melakukan perombakan atau penggantian berbagai perangkat yang bertujuan untuk menurunkan emisi atau mengganti sumber daya yang digunakan menjadi sumber daya energi terbarukan (EBT). Fasilitas atau aset tetap yang mendukung EBT saat ini masih merupakan barang yang relatif mahal dibandingkan dengan fasilitas yang telah ada.

Capital expenditure yang dilakukan perusahaan dapat merupakan fasilitas jangka panjang dalam menunjang aktivitas keberlanjutan. Sebaliknya aset lancar umumnya lebih akan menunjang aktivitas kegiatan operasional yang biasa, yang mungkin tidak terlalu terpengaruh oleh aktivitas keberlanjutan. Dalam penelitian ini *return* yang diperoleh perusahaan diprosikan menggunakan *Return on Assets (ROA)*. Rasio ini digunakan berkaitan dengan

asumsi bahwa pendapatan perusahaan (*return*) merupakan hasil dari pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Sumber daya perusahaan merupakan berbagai aset, termasuk aset tetap yang dimiliki untuk memproduksi atau kegiatan operasional lainnya. Aset tetap perusahaan umumnya masih merupakan aset yang digerakkan oleh energi listrik yang berasal dari batu bara atau minyak bumi yang diperoleh dari jalur PLN.

Pada periode awal penerapan aktivitas keberlanjutan, kebanyakan perusahaan yang selama ini menggunakan berbagai fasilitas berbasis *non-green*, harus bergeser ke berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas keberlanjutan. Karena itu sangat mungkin dalam jangka waktu pendek kegiatan tersebut akan meningkatkan investasi pada aset tetap perusahaan. *Ceteris paribus*, jika *return* perusahaan berada pada tingkat yang stabil, sementara investasi dalam aset meningkat, maka rasio *return* terhadap aset (*Return on Asset/ROA*) akan menurun.

Sebaliknya, pelaksanaan aktivitas keberlanjutan dalam jangka panjang seharusnya atau diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Perencanaan aktivitas keberlanjutan yang tepat yang dilakukan oleh perusahaan seyogyanya akan menunjang peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja perusahaan tersebut dipicu oleh semakin efisiennya sumber daya yang digunakan karena berbasis pada aktivitas yang berkelanjutan. Dengan semakin efisien penggunaan sumber daya, maka berbagai beban pengurang laba dapat menjadi semakin rendah.

Namun dapat juga terjadi bahwa dilakukan atau tidak dilakukannya aktivitas keberlanjutan tidak berdampak langsung atau signifikan terhadap *return* perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi ROA cukup kompleks. Dari rumus yang digunakan, *return* merupakan laba bersih akuntansi yang adalah selisih antara penghasilan dengan berbagai beban yang terjadi sepanjang periode. Dari faktor aset dapat ditinjau bahwa aset perusahaan dapat berasal dari *capital expenditure* maupun aset lancar yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Dari hasil uji beda secara statistik, diperoleh hasil korelasi ROA sebelum dan setelah terbitnya laporan keberlanjutan adalah berkaitan erat. Dapat dikatakan bahwa memang ROA antar tahun tidak mengindikasikan adanya perubahan yang signifikan, sebagaimana memang hasil dari pengukuran tingkat signifikansi. Hal ini dapat dijelaskan dengan argumen bahwa banyak faktor lain selain dari aktivitas keberlanjutan yang dapat mempengaruhi ROA, sebagaimana data yang digunakan dalam menghitung rasio tersebut.

ROA merupakan hasil dari perbandingan dua nilai, yakni *return*/laba dan aset yang diukur secara akuntansi. Nilai *return* atau laba akuntansi merupakan hasil dari pengurangan penghasilan dan beban-beban. Penghasilan yang dicatat secara akuntansi dapat merupakan hasil transaksi yang sudah direalisasi maupun hasil dari transaksi yang belum direalisasi sesuai dengan *accrual basis*. Artinya pengakuan laba akuntansi dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain pencatatan atas transaksi historis, terdapat pula hasil pertimbangan atau estimasi terkait kelayakan pengakuan suatu penghasilan.

Ditinjau dari faktor beban sebagai pengurang dari penghasilan untuk mendapatkan laba/*return*, terdapat lebih banyak lagi faktor yang mempengaruhi. Bukan hanya adanya beban-beban yang mungkin terjadi atau malah mungkin dihemat akibat adanya aktivitas keberlanjutan, melainkan juga termasuk di dalamnya adalah berbagai dampak dari estimasi pada aset. Misalnya estimasi atas aset tetap akan berdampak pada nilai beban penyusutan; estimasi penurunan nilai piutang mempengaruhi beban piutang tak tertagih; bahkan pemilihan metode pencatatan atas persediaan (FIFO atau average) juga akan mempengaruhi harga pokok persediaan.

Nilai kedua dari ROA adalah nilai aset. Aset secara akuntansi memang menunjukkan nilai yang relatif menunjukkan sumber daya perusahaan. Namun demikian, aset juga tidak terlepas dari berbagai pertimbangan estimasi, misalnya terkait dengan pemilihan metode penyusutan aset tetap, estimasi dalam menghitung penyisihan piutang tak tertagih, pemilihan metode pencatatan persediaan; penyisihan penurunan nilai inventory atau perhitungan penurunan nilai lainnya atas aset (*impairment*).

Dari paparan tersebut, dapat dipahami bahwa sangat banyak faktor yang akan mempengaruhi nilai ROA. Terlebih lagi bagi perusahaan yang sudah go publik, menjaga kestabilan nilai rasio-rasio keuangan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini tentunya terkait dengan nilai pasar saham yang dapat terpengaruh oleh nilai perusahaan yang tampak dari nilai rasio-rasio keuangannya. Karena itu tentunya terdapat semacam tuntutan secara psikologis bahwa ROA perusahaan tiap tahunnya harus meningkat. Dengan demikian meskipun perusahaan melakukan aktivitas keberlanjutan, namun kemungkinannya adalah aktivitas tersebut tidak dilakukan secara sekaligus atau signifikan, sehingga tidak berdampak terlalu besar dalam mengubah keuangan perusahaan.

Kemungkinan lainnya adalah karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari kondisi pandemi Covid-19. Dalam periode akhir tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2021, perusahaan masih mendapatkan tekanan besar dari kondisi masyarakat yang sebagian besar terpuruk. Keadaan ekonomi masyarakat yang secara umum menurun menyebabkan kemampuan belinya turut menurun, termasuk dalam membeli barang-barang konsumsi.

Karena itu perusahaan akan memilih untuk memprioritaskan perolehan aset yang akan menunjang pengembangan aktivitas yang dapat memulihkan kondisi aktivitas perusahaan. Artinya pembelian aset fasilitas yang menunjang aktivitas keberlanjutan kemungkinan ditunda jika dianggap belum akan segera membantu perusahaan bangkit dari keterpurukan akibat kondisi ekonomi nasional yang buruk. Perusahaan masih berfokus pada pemulihan kinerja ekonominya akibat pandemi Covid-19.

Meskipun kewajiban membuat laporan keberlanjutan sudah ditetapkan bagi perusahaan publik, namun belum adanya sanksi jika tidak melaporkan menyebabkan masih cukup banyak perusahaan yang menunda pelaporan tersebut. Hal ini juga menyebabkan perusahaan masih kurang memprioritaskan pelaporan keberlanjutan dibandingkan laporan keuangan tahunan. Dampaknya adalah masih ada perusahaan yang belum melaporkannya atau melaporkan hanya semata-mata untuk memenuhi peraturan saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian atas perusahaan publik yang termasuk dalam klasifikasi sektor industri *consumer non-cyclical* ditarik kesimpulan bahwa sebelum dan setelah adanya laporan atas aktivitas keberlanjutan yang dilakukan perusahaan tidak terdapat perbedaan kinerja yang diprosikan dalam *Return On Asset*. Tidak tampaknya perbedaan signifikan tersebut mungkin dipengaruhi oleh berbagai kondisi, diantaranya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Sehingga pelaporan keberlanjutan yang disusun baru sebatas pada pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan saja.

Selain itu, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Kendala penelitian ini adalah jangka waktu yang relatif masih pendek, karena perusahaan baru wajib melaporkan aktivitas keberlanjutan setelah ditunda selama 4 tahun akibat pandemi Covid-19.

SARAN

Beberapa saran yang dapat disampaikan terkait dengan penelitian ini adalah jika pelaksanaan aktivitas keberlanjutan telah dilakukan selama beberapa tahun, maka dapat diambil data *time series* yang lebih panjang untuk melihat apakah kinerja rata-rata sebelum dan setelah adanya aktivitas keberlanjutan memang berbeda dalam jangka waktu panjang. Selain itu juga dapat diperluas dengan melihat perbedaan pada rasio kinerja lainnya, atau memperluas sampel yang diuji.

DAFTAR PUSTAKA

- Bergevin, Peter M.. (2002). *Financial Statement Analysis – An Integrated Approach*. Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458.
- Bukhori, Mochamad Rizki Triansyah, Dani Sopian. (2017). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan. *SIKAP*, Vol 2 (No.1), hal 35 – 48 p-ISSN:2541-1691 Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan. Diakses dari <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>. tanggal 25 Agustus 2023.
- Burhan, Annisa Hayatun N, Wiwin Rahmanti. (2012). The Impact of Sustainability Reporting on Company Performance. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventur*. Volume 15, No.2 August 2012, pages 257 – 272, <http://dx.doi.org/10.14414/jebav.v15i2.79>. Accreditation no. 110/DIKTI/Kep/2009. Diakses dari <https://journal.perbanas.ac.id/index.php/jebav/article/view/79>. Tanggal 18 Juli 2023.
- Felita, Arina, Faisal. (2012). The Effect of Sustainability Reporting on Company Performance. *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 10, No.4, Tahun 2021, Halaman 1-9. Diakses dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting> ISSN (Online): 2337-3806 tanggal 22 Juli 2023
- Global Reporting Initiatives. (2021). *Consolidated Set of The GRI Standards 2021*. Diakses dari <https://www.globalreporting.org/standards/> tanggal 12 Januari 2023.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Perkembangan Sustainability Reporting Standards, Issue No.02/I/2022*. Diakses dari https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publicasi/Publikasi%20kedua%20TF-CCR.pdf tanggal 20 Juli 2023.
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2017). *Peta Jalan SDGs Indonesia menuju 2030*. Diakses dari https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf tanggal 18 Agustus 2023.

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Diakses dari <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/01/Pedoman-Monev-TPB-EDISI-II.pdf> tanggal 20 Juli 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). POJK No.51/OJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Keuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan,-Emiten,-dan-Perusahaan-Publik.aspx> tanggal 12 Januari 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). SE OJK No.16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Bentuk-dan-Isi-Laporan-Tahunan--Emiten-atau-Perusahaan-Publik/SEOJK%20-%2016%20-%202021.pdf> tanggal 15 Juli 2023.
- SASB. (2018). SASB Standards Application Guidance – Version 2018-10. Diakses dari <http://www.sasb.org/standards-overview/downloadcurrent-standards#> tanggal 12 Agustus 2023.
- Sunyoto, Danang. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi. ISBN: 978-602-7948-06-8. Refika Aditama. Bandung.
- United Nations Development Program. (2015). Sustainable Development Goals Booklets. Diakses dari <https://www.undp.org/publications/sustainable-development-goals-booklet> tanggal 18 Agustus 2023
- United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Diakses dari <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf> tanggal 18 Agustus 2023
- Wahyuningtyas, Endah Tri, Dina Anggraeni Susesti, Muis Murtadho. (2021). Dose Sustainability Reporting improve financial and non-financial performance in Indonesia Companies?. Advances in Economics, Business and Management Research, Volume 201. Atlantic Press. Diakses dari <https://www.atlantispress.com/proceedings/icosiams-21/125968384> tanggal 20 Agustus 2023.